BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, adil, makmur, dan maju. Dengan mengandalkan potensi wilayah dan kekayaan sumber daya yang ada dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan membantu dalam proses pembangunan. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional menerangkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dalam mengambil keputusan yang tepat, dengan menentukan urutan pilihan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Pembangunan dalam negeri telah menghasilkan upaya berbagai pengembangan dan kemajuan disegala aspek. namun disisi lain mewariskan berbagai permasalahan diantaranya masih ditemukannya disparitas atau ketimpangan antar daerah. Menurut Siagian dalam N, Wicaksono (2018) Pembangunan sebagai kapabilitas suatu komunitas yang terus bertumbuh positif dari segi kuantitatif maupun kualitatif dan merupakan suatu yang sepenuhnya harus terjadi dalam pembangunan.

Disparitas atau ketimpangan merupakan masalah pembangunan dalam konsep nasional maupun regional. Dimana ketimpangan menggambarkan distribusi pendapatan antara penduduk dalam suatu

wilayah. Buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumber daya menyebabkan Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta menghasilkan struktur hubungan yang mengakibatkan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Perbedaan karakteristik yang beragam baik dari sosial, fisik maupun sumber daya menyebabkan keadaan ketimpangan baik antar wilayah, ketimpangan antar kabupaten dan kota, maupun ketimpangan pendapatan. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang ada dan dapat mengelolanya dengan baik serta dapat mengembangkan potensinya untuk memperoleh nilai tambah sehingga dampak yang didapatkan yaitu menjadikannya daerah yang unggul dan maju.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensialnya sehingga akan menjadi nilai tambah untuk pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan memiliki peran yang besar dalam mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara terarah dan cepat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya penduduk suatu daerah akan membuat penduduk daerah tersebut berpindah ke daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja di daerah perkotaan yang lebih banyak.

Setiap tahunnya dibutuhkan penambahan pendapatan karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Hal ini dapat melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau output agregat setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, dan kenaikan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang (Azis, Hasan 2018).

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu provinsi, dimana jika semakin besar PDRB perkapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya berada di titik tengah wilayah Indonesia menjadikannya daerah yang paling berkembang dan menjadi motor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Berkembangnya 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan desentralisasi diduga mendorong ketimpangan antar daerah yang lebih lebar.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat dinilai dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan. Tabel dibawah ini menampilkan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
PDRB PerKapita Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

PROVINSI	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA					RATA-RATA PDRB PERKAPITA
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kepulauan Selayar	22,22	23,66	25,49	27,18	26,45	25,00
Bulukumba	17,50	18,60	19,41	20,37	20,34	19,24
Bantaeng	23,71	25,29	27,20	29,96	29,98	27,23
Jeneponto	15,40	16,58	17,52	18,38	18,32	17,24
Takalar	18,64	19,81	20,92	22,15	21,82	20,23
Gowa	15,18	16,00	16,86	17,84	17,88	16,75
Sinjai	24,20	25,78	27,53	29,04	29,34	27,18
Maros	34,86	36,86	38,76	38,87	34,35	36,74
Pangkajene dan Kepulauan	44,31	46,80	48,60	51,28	50,01	48,20
Barru	22,78	24,14	25,73	27,52	27,65	25,56
Bone	23,34	25,26	27,37	29,14	28,94	26,83
Soppeng	24,51	26,53	28,64	30,81	31,45	28,39
Wajo	29,46	30,91	31,14	32,32	31,87	31,14
Sidenreng Rappang	24,51	25,96	27,00	27,99	27,56	26,60
Pinrang	28,13	30,12	32,00	33,86	33,81	31,58
Enrekang	19,34	20,49	21,00	21,98	22,10	20,98
Luwu	22,71	24,05	25,49	26,87	27,03	25,23
Tana Toraja	15,93	17,02	18,26	19,48	19,33	18,00
Luwu Utara	21,55	22,99	24,72	26,28	25,93	24,94
Luwu Timur	52,74	53,21	53,90	53,47	53,23	53,31
Toraja Utara	18,00	19,36	20,79	22,23	22,15	20,15
Makassar	65,30	69,73	74,64	80,22	78,24	73,63
Parepare	29,25	30,92	32,28	34,08	33,70	32,05

Palopo	25,61	26,83	28,24	29,51	29,06	27,85
Rata-rata	26,64	28,20	29,73	31,28	30,86	29,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Data Diolah 2021

Tabel 1.1 memperlihatkan PDRB perkapita di Sulawesi Selatan pada tahun 2016-2020. Secara total PDRB perkapita di Sulawesi Selatan pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Namun apabila dilihat per Kabupaten/Kota hanya ada dua dari 24 Kabupaten/Kota propinsi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang rata-rata PDRB perkapitanya sangat jauh jaraknya dari Kabupaten/Kota lainnya yaitu Makassar (Rp. 73,63 Juta rupiah) dan Gowa (Rp.16,75 Juta rupiah).

Meningkatnya PDRB Perkapita Kota Makassar disebabkan karena nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi meningkat ditandai dengan produktivitas masyarakat pada masing-masing sektor meningkat. Meskipun PDRB Kota Makassar cenderung meningkat tiap tahunnya, namun tidak mungkin permasalahan pemeretaan distribusi pendapatan sewaktu-waktu akan terjadi.

Terkonsentrasinya aktivitas kegiatan ekonomi pada produk unggulan suatu wilayah di Sulawesi Selatan akan mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan. Hasil dari produk tersebut menjadi pendapatan per kapita. Perbedaan tingkat pendapatan per kapita inilah yang menjadi indikasi ketimpangan di suatu wilayah.

Secara harfiah, pembangunan bertujuan untuk meningkat taraf hidup masyarakat, dengan percepatan dan pemerataan bangunan dari

berbagai sektor. Namun saat ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga hasil pembangunan tersebut belum dinikmati oleh penduduk di wilayah Sulawesi Selatan secara merata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penelitian ini untuk mengetahui pengelompokkan daerah pada kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan berdasarkan pdrb perkapita dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui ketimpangan di provinsi sulawesi selatan. Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **"Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020 menggunakan Tipologi Klassen ?
2. Berapa besar ketimpangan pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020.

2. Untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai pembanding dalam bidang Ekonomi mengenai pengembangan keilmuan khususnya tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Secara praktis

   Dapat menjadi masukan khusus dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian juga dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam aspek yang sama maupun aspek yang terkait.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan suatu wilayah diilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian sekaligus harus menjadi fokus perhatian banyak kalangan yang kemudian dikembangkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan keadaan masyarakat lebih baik dan sejahtera .

Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebab pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai penambahan pendapatan nasional atau pertambahan output agregat atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun. Terdapat enam ciri teori pertumbuhan ekonomi modern menurut Prof. Simon Kuznets, yaitu :

1) Pertumbuhan pesat penduduk dan produk perkapita.
2) Perkembangan produktivitas tenaga kerja.
3) Laju Perubahan tingkat struktural yang tinggi.
4) Urbanisasi .
5) Pengembangan pada negara maju.
6) Terjadi perputaran barang, modal dan manusia antar negara.

Pendapatan rill nasional yang dihitung dari keseluruhan produksi barang dan jasa menggambarkan PDB (Produk Domestik

Regional Bruto) suatu negara. Selain itu pendapatan rill perkapita menunjukkan pendapatan masyarakat. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan, maka perekonomian mengalami pertumbuhan positif.

Kesejahteraan penduduk juga menggambarkkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rill perkapita. Adanya peningkatan tingkat ekonomi bagi seluruh masyarakat, tersedianya lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran, saat inilah terjadi pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan produktivitas meningkat.

Simon Kuznets menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai kemajuan teknologi yang diikuti dengan penyesuaian ideologi suatu negara yang mampu meningkatkan hasil produksinya. Teori pertumbuhan ekonomi saat ini banyak berkembang. Teori ini sendiri muncul banyak untuk menjelaskan siklus pertumbuhan serta berbagai perbedaan sudut pandang oleh para ahli. Di antara banyak teori yang bermunculan dengan beberapa dari mereka meliputi:

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik
    1) Teori Klasik muncul akhir abad ke-18 pencetusnya adalah Adam smith, menurutnya perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada peningkatan pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

2) David Ricardo mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk secara terus menerus tidak memberikan pengaruh postif dan hanya akan menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Upah yang diterima masing-masing menurun dikarenakan tenaga kerja melimpah. Dimana upah tersebut hanya cukup membiayai tingkat standar hidup. Pada tahap tersebut, perekonomian akan terhenti.
3) Thomas Robert Malthus mengatakan perkembangan penduduk yang besar dibanding dengan produksi pangan, akan terjadi kelangkaan.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

1) Horrod-Domar mengatakan bahwa untuk mencapai perekonomian yang mantap perlunya dengan pembentukan modal (investasi).
2) Schumpeter mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu inovasi yang dilakukan oleh wirausahawan dalam aktivitas produksi.
3) Robert-Solow mengatakan terdapat empat faktor rangkaian kegiatan yaitu, manusia, tabungan, teknologi, dan hasil output. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Sadono Sukirno, 2015).

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

1) Frederich List mengatakan pertumbuhan ekonomi dibagi beberapa tahapan yang didasari berdasarkan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui cara produksi. Dimulai dari mengembara dan berburu, bertani dan beternak, kerajinan dan pertanian, industri dan perniagaan.
2) Werner Sombart mengatakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan masyarakat pada struktur organisasi dan ideologi masyarakat. Terdapat tiga tahapan yaitu tahap pertama, zaman perekonomian tertutup. Tahap kedua zaman kerajinan dan pertumbuhan dan ketiga zaman kapitalis.
3) Walt Whitman Rostow membagi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahapan sebagai syarat pembangunan untuk mencapai tingkatan yang lebih maju. Tahapan masyarakat tradisional, tahapan transisi, tahapan tinggal landas, tahapan kematangan ekonomi, dan tahapan konsumsi massal tinggi.
4) Karl Bucher membagi beberapa tahapan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada langkah-langkah dari kebutuhan, mulai dari tingkat produsen hingga konsumen. Tahapan pertama, rumah tangga tertutup, kedua rumah tangga kota, rumah tangga bangsa dan rumah tangga

dunia.

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern Kuznets

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan yang berkepanjangan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi serta penggunaan teknologi secara efektif dan efesien. Dengan demikian, manifestasi dari pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan output secara berkesinambungan (Todaro, 2011).

Menurut Boediono (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita dalam masa panjang. Penekanan pada proses yang memuat aspek dinamis. Menurut teoritis modern, ilmu ekonomi pembangunan masih terus mengalami penyempurnaan arti, konsep dan dasar pertumbuhan ekonomi. Para teoritisi tersebut mengatakan bahwa selain pertambahan PDB dan PDRB yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diberi tambahan nilai yang bersifat bukan materi seperti kepuasaan, kenyamanan dan kebahagiaan, tentram dan aman yang dapat dinikmati masyarakat luas (Arsyad, 2010).

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai proses perkembangan kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat bertambah secara terus menerus menuju keadan yang

lebih baik selama waktu tertentu dalam bentuk perkembangan pendapatan nasional .

Menurut (Shaid 2022), Adapun beberapa aspek yang mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

   Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam, termasuk kesuburan tanah, kekayaan sumber daya alam baik mineral, hasil laut dan hasil hutan. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah akan menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan di sebagian besar di negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Kedua, aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia selaku penggerak kegiatan ekonomi, Karena manusialah yang langsung akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. SDM merupakan faktor utama dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. SDM yang berkualitas akan mampu mengelola sumber perekonomian.

3. Akumulasi modal

   Akumulasi modal merupakan proses kegiatan atau

penyimpatan pendapatan untuk diivestasikan kembali yang bertujuan untuk meningkatan modal dalam bentuk benda seperti peralatan, mesin dan bangunan. Manusia memerlukan modal untuk meningkatkan output .

4. Tenaga manajerial dan organisasi produksi

   Organisasi produksi sebagai bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan shari-hari

5. Perkembangan teknologi

   Selain itu, aspek lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong percepatan proses pembangunan. Perubahan pola kerja yang tadinya memerlukan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berpengaruh terhadap aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas. Serangkaian kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

6. Faktor politik dan administrasi pemerintah

   Dari sisi non ekonomi, faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu struktur politik dan administrasi

pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi.

7. Aspek sosial budaya

   Berikutnya, faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa arah intelek dan skeptisisme yang dapat menumbuhkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru.

Menurut Kuznets, yang telah berkontribusi besar dalam mempelopori analisis pola-pola pertumbuhan histori di negara-negara maju menyatakan bahwa pada tahapan pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap selanjutnya hal itu akan membaik. Penelitian inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik. Arsyad (2010) menyatakan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipelopori oleh ekonom *Perroux* menerangkan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di sebagian tempat yang

merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat. tingkat kesejahteraan tersebut diiukur dengan PDB Perkapita. makin tinggi tingkat PDB Perkapita maka makin sejahtera masyarakat. agar perekonomian terus tumbuh maka PDB Perkapita harus meningkat dari pada tingkat pertambahan penduduk. jika pertumbuhan PDB 2% pertahun, maka pertambahan penduduk harus lebih kecil dari 2%.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu parameter penting untuk melihat kondisi ekonomi disuatu periode tertentu ditunjukkan oleh angka data Produk domestik Bruto dibutuhkan sebagai bahan analisa baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan sebagai produksi barang dan jasa yang dhasilkan suatu masyarakat dalam periode satu tahun atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu unit ekonomi disuatu wilayah (BPS, 2021).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk penyusunan PDRB digunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi dimaksudkan pertambahan total nilai barang dan jasa

yang dihasilkan oleh unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Kedua, pendekatan pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses produksi. Ketiga, pendekatan pengeluaran merupakan semua elemen pengeluaran PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 bentuk penilaian, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena jumlah output agregat dinilai sesuai dengan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Berdasarkan lapangan usaha PDRB dibagi menjadi 17 sektor, meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini menggunakan harga tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini tahun dasar 2010. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat penyesuaian dan struktur ekonomi sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

PDRB per kapita merupakan jumlah nilai penduduk dibagi PDB/PDRB dalam suatu wilayah perperiode tertentu. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

3. Disparitas Pendapatan

Perubahan sosial bermula dari adanya kecemburuan sosial antara kalangan sebagai efek dari keadaan ekonomi dalam masyarakat dan terjadinya ketimpangan dan kemiskinan. Baik ketimpangan antara golongan, antara daerah, maupun ketimpangan antar sektor. Oleh sebab itu kerangka pembangunan Nasional menekankan pada azas “Trilogi pembangunan” yang

meliputi pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, ketiga aspek Trilogi pembangunan tersebut merupakan kondisi yang dinamis dan saling bergantian prioritasnya penekananya dalam setiap rencana pembangunan ekonomi (Muhtarom 2017).

Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang dimiliki pada masing-masing wilayah. Akibatnya terdapat perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu, pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju *(Developed Region)* dan wilayah terbelakang *(Underdeveloped Region).* Terjadi ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah.

Menurut Muharomatullah Azizah (2016) terdapat beberapa definisi ketimpangan menurut teori para ahli :

1. Menurut Andrinof A. Chaniago, ketimpangan merupakan akibat dari pembangunan yang hanya berpusat pada aspek ekonomi dan mengabaikan aspek sosial.
2. Menurut Budi Winarno, ketimpangan adalah dampak dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi keperluan fisik dan psikis masyarakat.

3. Menurut Jonathan Haughton & Shahidur R. Khand, ketimpangan sebagai keadaan ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan.
4. Roichatul Aswidah, ketimpangan sering dilihat sebagai efek residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

Definisi dari ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang alamiah, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal perwujudan pembangunan antar daerah.

Firdaus, Muhammad (2013) mengatakan bahwa persoalan ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah merupakan persoalan historis yang dihadapi oleh setiap negara. Terjadinya fenomena tersebut dapat disebabkan oleh unsur keterbukaannya atau akses terhadap luar wilayah yang sudah berlangsung sejak lama. Sehingga menghasilkan ukuran pasar yang lebih besar karena konsentrasi jumlah penduduk di wilayah tersebut lebih maju. Namun wilayah yang kurang berkembang tersebut banyak yang lebih kaya akan sumber daya alam.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah akan menyebabkan ketimpangan dalam perkembangan ekonomi di berbagai daerah pada suatu wilayah.

Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak dilakukan Kuznets (1955) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara *cross-sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali.

Berikut beberapa aspek menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

   Perbedaan kandungan sumber daya alam akan memberikan dampak pada kegiatan produksi di daerah tersebut. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam cukup banyak akan dapat menciptakan barang-barang tertentu dengan beban yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Kondisi

ini akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan lebih cepat.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

   Perbedaan kondisi demografis disebabkan kandungan sumber daya alam disetiap daerah berbeda. Sehingga menyebabkan, perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Daerah dengan keadaan demografis yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja masyarakat setempat, sehingga hal ini akan meningkatkan investasi yang kemudian akan ketersediaan lapangan kerja .

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

   Mobilitas barang dan jasa mencakup kegiatan aktivitas perpindahan perdagangan antar daerah melalui sistem pemerintahan (transmigrasi) atau migrasi spontan. Sebab daerah yang kelebihan produksi tidak dapat dijual ke daerah yang lain membutuhkan dikarenakan mobilitas yang kurang lancar. Sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

   Terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu menyebabkan terkonsentrasi kegiatan ekonomi

pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah yang memiliki ketersediaan sumber daya alam yang banyak.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

   Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pelaksanan otonomi daerah pada orde baru, dana dari pemerintah akan lebih banyak diberikan ke daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan lebih rendah. Untuk investasi swasta ditentukan oleh faktor yang berbeda seperti kekuatan pasar, dimana keuntungan didapatkan dari lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pengaruh dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Kesenjangan pada hakikatnya tidak dapat dihilangkan dalam kegiatan pembangunan daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang tertinggal untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu daerah dapat bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi

ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya kesenjangan antar daerah.

ketimpangan antar kelompok masyarakat yang dilihat berdasarkan distribusi pendapatan, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antar wilayah. Adapun aspek yang menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah yaitu konsentrasi kegiatan ekonomipada daerah yang memiliki sumber daya yang banyak, aktivitas perpindahan perdagangan dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antar daerah dengan daerah lainnya.

Upaya untuk mengatasi ketimpangan ditentukan oleh faktor-faktor pemicu ketimpangan yang telah diuraikan sebelumnya. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antara lain penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pengembangan pusat pertumbuhan dan pelaksanaan otonomi daerah.

4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan

1. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis regional yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur basis dan non basis serta mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah.

Tipologi kalssen ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral ekonomi sedangkan pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah. Tipologi klaseen mengklasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan sumbu vertikal sebagai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Dalam penelitian Henry, (H aswandi dan M Kuncoro) menggunakan Tipologi Klassen Pendekatan wilayah menghasilkan empat klasifikasi kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu :

1. Daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*Rapid Growth Region*/Kuadran I)

   Daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan

yang sangat besar dan telah dimanfatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat.

2. Daerah berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran II)

   Daerah berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena di masa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

3. Daerah maju tapi tertekan (*Retarted region*/Kuadran IV)

   Daerah maju tapi tertekan (*Retarted Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

4. Daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*/ Kuadran III).

   Kemudian daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada di bawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya (Sjafrizal, 2012).

Tabel 2.1
Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Tipologi Klassen

PDRB Perkapita (y) / **Laju Pertumbuhan (r)**	$y_i < y$	$y_i > y$
$r_i > r$	(Kuadran I) Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh	(Kuadran II) Daerah Berkembang

$r_i < r$	(Kuadran III) Daerah Maju Tapi Tertekan	(Kuadran IV) Daerah Relatif Tertinggal

Keterangan :

yi : pendapatan perkapita antar Propinsi

y :pendapatan perkapita Sulawesi Selatan

ri : laju pertumbuhan PDRB antar Propinsi

r : laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan progres barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja atau aktifitas dari berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$Rog = (PDRB_t – PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1} \times 100\%$$

Jika pertumbuhan ekonomi (g) adalah negatif berarti Produk Domestik Regional Bruto ($PDRB_1$) tahun pengamatan tertentu lebih kecil dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya ($PDRB_{t-1}$), sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi (g) adalah positif berarti Produk Domestik Regional Bruto ($PDRB_t$) tahun pengamatan tertentu lebih besar dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya ($PDRB_{t-1}$).

Intinya, pendapatan regional tidak selalu meningkat setiap tahun. Pertumbuhan yang positif dan mengalami peningkatan menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian yang terjadi, sebaliknya apabila pertumbuhan negatif atau menurun berarti terjadi penurunan kinerja dan aktivitas perekonomian.

2. Indeks Williamson

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran agar tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota yang terjadi di antar propinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks

ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson):

$$IW = \sqrt{\frac{\sum \quad (Yi - Y)^2 f_{\frac{i}{n}}}{Y}}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

yi =PDRB per kapita Propinsi

y=PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah di Sulawesi Selatan

fi = jumlah penduduk Propinsi

n = jumlah penduduk seluruh daerah di Sulawesi Selatan

Hasil yang didapatkan dari hasil perhitungan Indeks Williamson nantinya akan disimpulkan kedalam kriteria sebagai berikut:

a. Nilai 0,0 s/d 0,2 menandakan ketimpangan pendapatan yang rendah.
b. Nilai 0,21 s/d 0,35 menandakan tingkat ketimpangan dstribusi pendapatan sedang.
c. Nilai >0,35 menandakan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Saputra, dalam penelitian Dwi Reza Khusnul Khuluk (2021).

Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya

perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional.

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara ormal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah .

B. Penelitian Terdahulu

Baiq Hipziwaty, Putu Karismawan, Baiq Ismiwaty (2019) dengan judul Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan, dan Kesejahteraan Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat cendrung berfluktuatif yang dipengaruhi oleh naik turunnya nilai sektor ekonomi. Berfluktuatifnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh naik turunya nilai berbagai sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan seperti sektor pertanian, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran dan resparasi mobil dan sepeda

motor. Rata-rata pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 6,0% yang dimana masih dalam pertumbuhan ekonomi sedang. Disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diukur dengan indeks Williamson dalam periode 2010-2016 yang ditunjukkan oleh nilai indeks Williamson yang lebih besar dari 0, indeks Williamson memperlihatkan kencendrungan yang semakin menurun setiap tahunnya dan tergolong dalam kriteria ketimpangan sedang. Berdasarkan hasil estimasi hubungan variabel pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diukur menggunakan IPM tahun 2010-2016 menggunakan analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect (FEM) sebagai model terbaik, ditemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian variabel disparitas pendapatan berhubungan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Riris Lastri Nababan dan Banatul Hayati (2019) dengan judul penelitian Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor penentu Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2016. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa masih tinggi, yaitu dengan rata-rata senilai 0,6 yang

menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki ketimpangan tinggi, terlihat bahwa distribusi pendapatan tidak merata setiap tahunnya antar daerah yang ada di Pulau Jawa. Hasil kurva Lorenz dan gini rasio menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di pulau jawa dari tahun 2011 hingga 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh semakin menjauhnya kurva Lorenz dari garis pemerataan. Angkatan Kerja menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini berarti *marginal productivity of labor* di Pulau Jawa rendah sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin lama jenjang pendidikan formal yang dilalui maka akan semakin menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif.

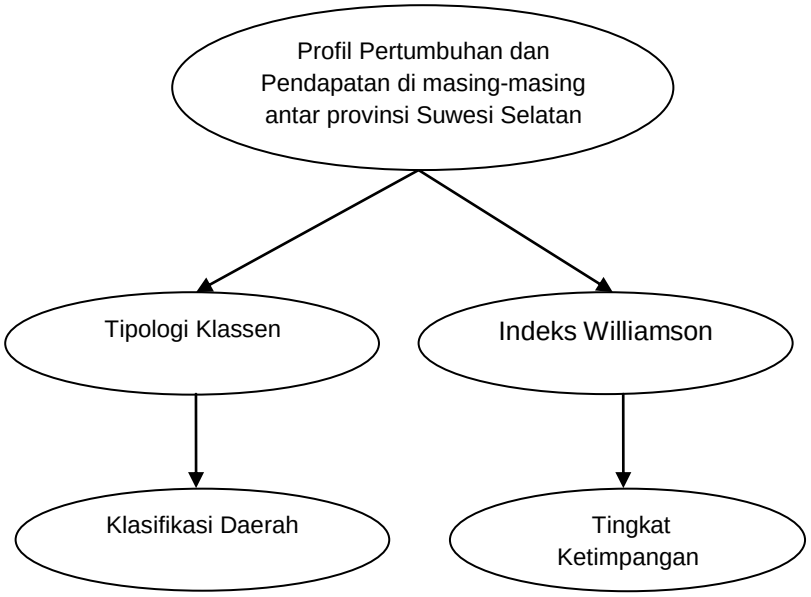
Nursa Fitri, Junaiddin Zakaria, Hasbi (2021) dengan judul penelitian Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan terhadap Kesejahteraan antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019. Penelitian ini menarik kesimpulan Pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 mengalami fluktuasi. Klasifikasi Tipologi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 Berdasarkan Tipologi Klassen, terdapat daerah yang dikategorikan sebagai daerah maju dan tumbuh cepat (Kuadran I), daerah maju tapi tertekan

(Kuadran II), daerah berkembang cepat (Kuadran III) dan daerah relatif tertinggal (Kuadran IV). Indeks Williamson menunjukkan terjadinya kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2005-2019. Secara parsial Pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori di atas maka dapat disusun hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga terdapat perbedaan klasifikasi antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menurut analisis Tipologi Klassen.
2. Diduga terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menurut analisis Indeks Williamson.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah penelitian deskriptif. Metode Deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian yang berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subana, 2011). Penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya .

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan penulis berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Waktu Penelitian

   Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari bulan November 2021–Januari 2022

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah provinsi Sulawesi Selatan meliputi kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Gowa, Barru, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, Kota Makassar, Palopo dan Pare-pare Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel karena merupakan penelitian populasi dimana semua populasi digunakan sebagai sampel.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

   Menurut (Sugiyono, 2013) variable independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, disebut juga variabel yang mempengaruhi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 1 variabel yaitu Pertumbuhan Eknomi .

   Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai rill PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi digambarkan pada Pendapatan Dosmetik Bruto (PDRB)

menurut harga konstan 2010 yang dinyatakan dengan satuan persen untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016–2020, dirumuskan sebagai berikut :

$$Rog = (PDRB_t – PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1} \times 100\%$$

Dimana:

Rog = Pertumbuhan ekonomi daerah

$PDRB_t$ = PDRB pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB pada satu tahun sebelum t.

Dalam penelitian ini besarnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan dimensi persentase (%).

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini variable terikat adalah Ketimpangan Pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan perbedaan pendapatan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan besarnya deviasi PDRB per kapita kabupaten/ kota dari rata-rata PDRB per kapita provinsi.

Untuk mengukur ketimpangan pembangunan pada penilitian ini menggunkan Indeks Williamson. Indeks Williamson berfungsi untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunkan PDRB per kapita sebagai data dasar,

alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas maka berikut ini penjelasannya :

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Dalam penelitian ini variabel ketimpangan distribusi pendapatan dianalisis dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson :

$$IW = \sqrt{\frac{\sum_i \quad (Yi - Y)^2 f_{i/n}}{Y}}$$

IW = Indeks Ketimpangan Williamson

Yi = PDRB per kapita di Kabupaten/Kota

Y= PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota

n = Jumlah penduduk Provinsi Sulsel

PDRB per kapita = PDRB/ jumlah penduduk

Angka indeks Ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau pembangunan yang merata dan bila semakin jauh dari titik nol (mendekati satu) menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

   Data Sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakannya. Sumber data tersebut didapat dari Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **:**

   1. PDRB ADHK daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
   2. PDRB Perkapita ADHK periode tahun 2016-2020.
   3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020.
   4. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020.
   5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik

pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013). Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni, Dokumentasi dan Data Sekunder.

1. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
2. Metode pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Arikunto, 2010). Penelitian ini mendokumentasikan data-data statistik yang merupakan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut (Sugiyono, 2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,menjabarkan ke dalam unit -unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan analisis Ekonomi Regional. Analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut **:**

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah

   Analisis yang digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Tipologi Klassen. Alat Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu : daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*), daerah maju tapi tertekan (*Retarted Region*), daerah berkembang cepat (*Growing Region*), dan daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*).

2. Analisis Tingkat Ketimpangan Antar Daerah

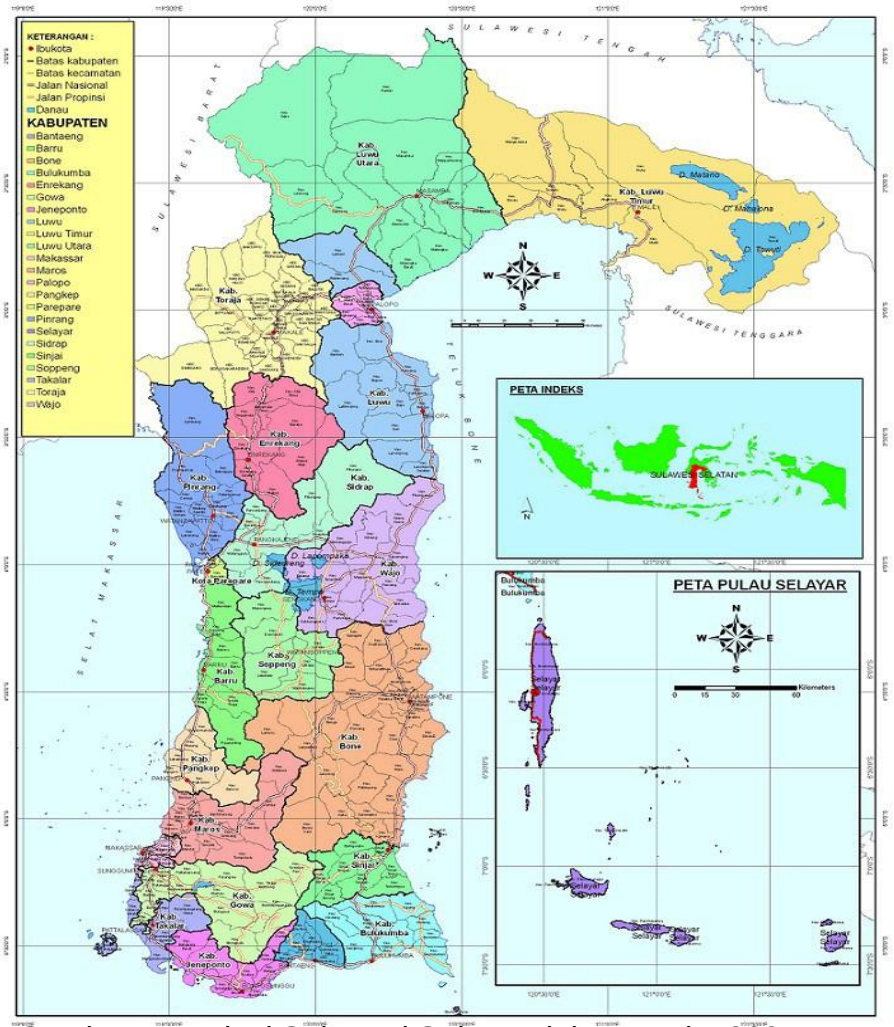
   Analisis yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Sulawesi Selatan dapat dianalisis

dengan menggunakan indeks ketimpangan regional yang dinamakan indeks Williamson.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

1. Letak Geografis Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka 2021

Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara 0° 12’ Lintang Selatan dan 8° Lintang Selatan dan antara 116° 48’ − 122° 36’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Luas wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan tercatat 46.717,48 km persegi yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas dengan luas 7.502,58 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,06 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kota Parepare merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 99,33 km persegi atau 0,21 persen dari wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas:

a) Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah
b) Sebelah Selatan : Laut Flores
c) Sebelah Barat : Selat Makassar
d) Sebelah Timur : Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan letak geografisnya, Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulaan Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.

Desa/Kelurahan Tepi Laut adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang. Desa/Kelurahan bukan tepi laut adalah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak bersinggungan langsung dengan laut.

Berdasarkan pengamatan selama tahun 2020 rata-rata suhu udara 28,47 °C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di kota Makasssar 30,55 °C. Kelembaban udara di kota Makassar rata-rata 77,65 persen dan minimum 54 persen.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk disetiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Sulawesi Selatan 8.060,4 ribu jiwa, lalu tahun 2020 meningkat dengan laju pertumbuhan 1,18% menjadi 9.037,5 ribu jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan ialah kota Makassar dengan jumlah 1.423,9 ribu jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 137,1 ribu jiwa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kepulauan selayar	131.605	133.003	134.280	135.624	136.871	134.277
Bulukumba	413.229	415.713	418.326	420.603	423.012	418.177
Bantaeng	184.517	185.581	186.612	187.626	188.495	186.566
Jeneponto	357.807	359.787	361.793	363.792	365.610	361.758
Takalar	289.978	292.983	295.892	298.688	301.424	295.793
Gowa	735.493	748.200	760.607	772.684	784.511	760.299
Sinjai	239.689	241.208	242.672	244.125	245.389	242.617
Maros	342.890	346.383	349.822	353.121	356.195	349.682
Pangkep	326.700	329.791	332.674	335.514	338.219	332.580
Barru	171.906	172.767	173.623	174.323	174.989	173.522
Bone	746.973	751.026	754.894	758.589	762.073	754.711
Soppeng	226.305	226.466	226.770	226.991	227.208	226.748
Wajo	394.495	395.583	396.810	397.814	398.784	396.697
Sidrap	292.985	296.125	299.123	301.972	304.826	299.006
Pinrang	369.595	372.230	374.583	377.119	379.402	374.586
Enrekang	201.614	203.320	204.827	206.387	207.800	204.790
Luwu	353.277	356.305	359.209	362.027	364.680	359.100
Tana Toraja	230.195	231.519	232.821	234.002	235.103	232.728
Luwu Utara	305.372	308.001	310.470	312.883	315.202	310.386
Luwu Timur	281.822	287.874	293.822	299.673	305.407	293.720
Toraja Utara	226.988	228.414	229.798	231.214	232.394	229.762
Makassar	1.469.601	1.489.011	1.508.154	1.526.677	1.545.373	1.507.763
Pare- Pare	140.423	142.097	143.710	145.178	146.714	143.624
Palopo	172.916	176.907	180.678	184.614	188.323	180.688
Sulawesi Selatan	8.606.375	8.690.294	8.771.970	8.851.240	8.928.004	8.769.577

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020, Data diolah

Dari Tabel 4.1 atas ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah penduduk bahwa daerah dengan jumlah penduduk terbanyak selama 5 tahun dari 2016-2020 adalah Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka 1.507.763 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten

Selayar dengan angka 134.277 juta jiwa. Selain itu Kabupaten Bone mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar pula yaitu 758.711 juta jiwa. Selain itu daerah yang berbatasan dengan ibu kota provinsi memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar yaitu Kabupaten Gowa dengan angka 760.299 juta jiwa, dibanding daerah lainnya.

Pertumbuhan penduduk setiap tahun akan berdampak pada usia kerja yang mempengaruhi pertumbuhan maupun jumlah angkatan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk memperluas lapangan kerja produktif, baik jumlah maupun mutunya. Melalui pembangunan ketenagakerjaan diharapkan terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunanan jumlah pengangguran.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penunjuk adanya pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil diharapkan berperan dalam meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi sehingga merangsang bagi berkembangnya ekonomi dalam skala yang lebih besar, serta berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya perubahan statistik pendapatan regional, atau

yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu.

Pertumbuhan suatu ekonomi negara dapat mendorong laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase.

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupate/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 (%)

Kabupaten/kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 (%)					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kepulauan Selayar	7,35	7,61	8,75	7,68	-1,78	5,92
Bulukumba	6,77	6,89	5,05	5,49	0,43	4,93
Bantaeng	7,39	7,31	8,13	10,75	0,52	6,82
Jeneponto	8,32	8,25	6,29	5,47	0,16	5,70
Takalar	9,61	7,37	6,66	6,87	-0,61	5,98
Gowa	7,57	7,21	7,14	7,46	1,76	6,23
Sinjai	7,09	7,23	7,44	6,12	1,55	5,89
Maros	9,50	6,81	6,19	1,24	-10,87	2,57
Pangkajene dan Kepulauan	8,31	6,60	4,76	6,41	-1,69	4,88
Barru	6,01	6,48	7,11	7,41	0,87	5,58
Bone	9,01	8,41	8,91	7,01	-0,25	6,62
Soppeng	8,11	8,29	8,11	7,69	2,19	6,88
Wajo	4,96	5,21	1,08	4,06	-1,17	2,83
Sidenreng Rappang	8,77	7,09	5,02	4,65	-0,59	4,99
Pinrang	7,44	7,84	6,91	6,53	0,44	5,83
Enrekang	7,63	6,84	3,26	5,43	1,25	4,88
Luwu	7,88	6,79	6,86	6,26	1,30	5,82
Tana Toraja	7,29	7,47	7,89	7,22	-0,28	5,92
Luwu Utara	7,49	7,60	8,39	7,11	-0,59	6,00
Luwu Timur	1,58	3,07	3,39	1,17	1,46	2,13
Toraja Utara	8,01	8,22	8,07	7,56	0,17	6,41
Makassar	8,03	8,20	8,42	8,79	-1,27	6,43

ParePare	6,87	6,97	5,58	6,65	-0,08	5,20
Palopo	6,95	7,17	7,52	6,75	0,45	5,77
Rata-rata	7,41	7,12	6,54	6,32	-0,28	5,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, Data diolah

Peningkatan serta tingginya pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bila dilihat dari tabel 4.2 di atas ini, mengenai laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari rata-rata, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penaikan yaitu Kabupaten Soppeng dengan nilai 6,88%. Sedangkan kabupaten/kota terendah yaitu Luwu timur dengan nilai 2,13 %. Melihat keadaan tersebut menandakan masih terjadinya ketimpangan di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan di tahun 2016 dengan nilai 7,41% dan mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Di tahun 2017 angka laju pertumbuhan ekonomi 7,12%, tahun 2018 6,32% dan di tahun 2020 mengalami minus yaitu -0,28% hal ini disebabkan karna penurunan diberbagai sektor.

4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, 2016 - 2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
kepulauan Selayar	17,21	17,61	17,59	17,36	17,04	17,36
Bulukumba	33,25	33,1	31,25	30,49	30,00	31,62
Bantaeng	17,53	17,91	17,20	16,91	16,84	17,28
Jeneponto	55,32	55,34	55,95	54,05	53,24	54,78
Takalar	27,05	26,99	26,57	25,93	25,38	26,38
Gowa	61,52	62,77	59,34	57,99	57,68	59,86
Sinjai	22,51	22,25	22,48	22,27	22,06	22,31
Maros	39,02	38,50	35,97	34,85	34,62	36,59
Pangkep	52,86	53,38	50,12	47,07	47,12	50,11
Barru	16,24	16,76	15,68	14,92	14,44	15,61
Bone	75,09	77,13	79,57	76,25	81,33	77,87
Soppeng	19,12	18,76	17,00	16,45	17,23	17,71
Wajo	29,46	29,19	29,73	27,48	27,69	28,71
Sidrap	15,92	15,72	15,41	14,44	15,36	15,37
Pinrang	31,28	31,43	32,94	31,85	33,56	32,21
Enrekang	26,98	26,71	25,53	25,4	25,25	25,97
Luwu	50,58	49,80	47,91	46,18	46,04	48,10
Tana Toraja	28,42	29,18	29,65	28,87	28,41	28,91
Luwu Utara	43,75	44,04	42,43	42,48	42,20	42,98
Luwu Timur	21,08	21,94	21,15	20,83	20,82	21,16
Toraja Utara	33,02	32,85	30,68	28,64	27,88	30,61
Makassar	66,78	68,19	66,22	65,12	69,98	67,26
Pare Pare	8,02	8,07	8,01	7,62	7,96	7,94
Palopo	15,02	15,44	14,27	14,37	14,71	14,76
Sulawesi Selatan	807,03	813,07	792,63	767,8	776,83	791,47

Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2020, Data Diolah

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2020 berjumlah 776,83 ribu dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Apabila dilihat berdasarakan Gambar 4.2 Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak pada Kabupaten Bone sebesar dengan rata-rata 77,87 ribu jiwa. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah yaitu dengan rata-rata 7,94 ribu jiwa.

Salah satu faktor yang mennyebabkan turunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan adalah adanya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas perekonomian di Sulawesi Selatan. Kebijakan pembatasan aktivitas mengakibatkan banyak usaha yang berhenti beroperasi sehingga beberapa tenaga kerja terpaksa dirumahkan. Komposisi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan dari tahun ke tahun relatif terdapat perubahan signifikan.

Tabel 4.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2016-2020

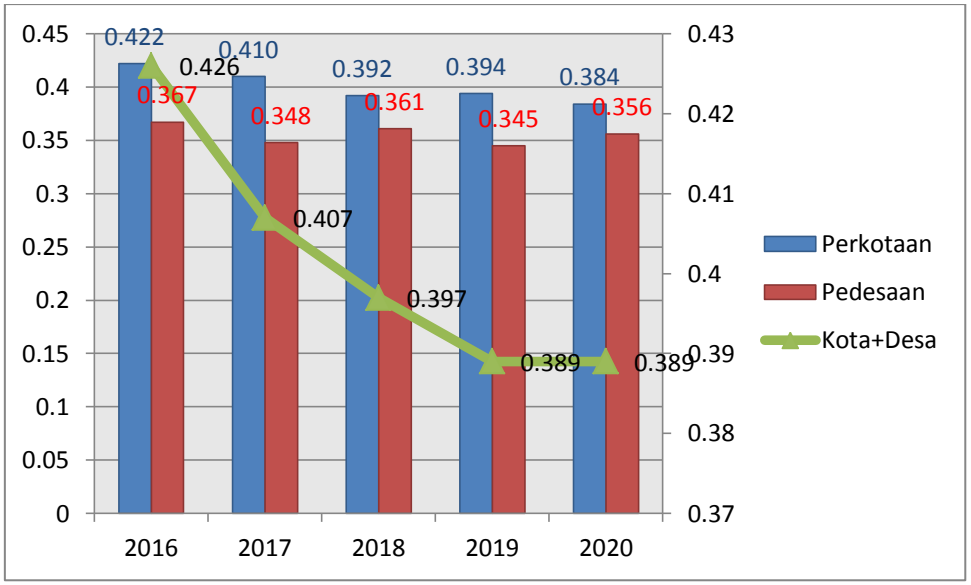
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Mar-16	149,13	657,90	807,03	4,51	12,46	9,40
Mar-17	153,56	659,51	813,07	4,48	12,56	9,38
Mar-18	167,94	624,70	792,64	4,61	12,24	9,06
Mar-19	170,10	597,69	767,80	4,44	11,95	8,69
Mar-20	173,80	603,03	776,83	4,49	11,97	8,72

Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2020, Data Diolah

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar berada di daerah pedesaan. Pada maret 2020. Penduduk miskin di pedesaan mencapai 603,03 ribu jiwa (77,63 persen), sementara di daerah perkotaan hanya 173,80 ribu jiwa (22,37 persen). Dibandingkan dengan maret 2019, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan 3,70 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 5,34 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2020 penduduk miskin di perdesaan mencapai 11,97 persen sedangkan di perkotaan sebesar 4,49 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah pedesaan atau dengan kata lain daerah perkotaan menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam yang umumnya ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Adanya ketimpangan pembangunan dan kurangnya lapangan pekerjaan di desa akan mendorong migrasi masyarakat desa ke kota. Diperlukan perencanaan pembangunan desa yang berkesinambungan untuk mengurangi gap antara desa dan kota tersebut.

Tabel 4.4 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2016-Maret 2020



Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2020, Data Diolah

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukka ketimpangan yang semakin tinggi. Selama periode Maret 2016-2019, Tampak bahwa Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan terus menurun. Gini Ratio pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,426, terus menurun hingga Maret 2019 menjadi 0,389. Sementara untuk kondisi Maret 2020, Gini Ratio cenderung sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,389. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2019 hingga Maret 2020 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,010 poin. Sedangkan di daerah perdesaan

nilai Gini Ratio mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin pada Maret 2020 dibanding dengan Maret 2019.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah berdasarkan dua indikator utama, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ditentukan sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbuh horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: Kuandran I daerah maju dan tumbuh cepat, Kuandran II daerah maju tapi tertekan, Kuandran III daerah berkembang cepat, dan Kuandran IV daerah relatif tertinggal.

Tabel 5.1 Hasil Rata-Rata PDRB Per kapita, Pertumbuhan PDRB per Kapita, dan Tipologi Klassen kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB KABUPATEN/KOTA (y)	Tipologi Klassen
Kepulauan Selayar	5,92	25000,37	III
Bulukumba	4,93	19680,10	IV
Bantaeng	6,82	27227,81	III
Jeneponto	5,70	17237,01	III
Takalar	5,98	20667,81	III
Gowa	6,23	17144,78	III
Sinjai	5,89	28639,26	III
Maros	2,57	37209,39	II
Pangkajene dan Kepulauan	4,88	48201,42	II
Barru	5,58	26966,57	III
Bone	6,62	26827,17	III

Soppeng	6,88	28388,75	III
Wajo	2,83	31197,39	II
Sidenreng Rappang	4,99	26602,26	IV
Pinrang	5,83	31585,05	I
Enrekang	4,88	20982,45	IV
Luwu	5,82	25229,13	III
Tana Toraja	5,92	18246,66	III
Luwu Utara	6,00	24293,32	III
Luwu Timur	2,13	53310,18	II
Toraja Utara	6,41	20507,44	III
Makassar	6,43	73623,54	I
Parepare	5,20	32048,05	III
Palopo	5,77	29056,87	II

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata laju Pertumbuhan PDRB per Kapita dan PDRB per Kapita di masing-masing kabupaten/kota dari tahun 2016-2020. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Soppeng sebesar 6,88 persen, diikuti Kabupaten Bantaeng sebesar 6,82 persen, dan pertumbuhan terendah ada pada Kabupaten Luwu Timur sebesar 2,13 persen.

Nilai PDRB per kapita didapat dari pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk mengukur Analisis Tipologi Klassen dengan melihat besar laju pertumbuhan dengan PDRB per kapita di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan dibandingkan nilainya dengan laju pertumbuhan dan PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 5.2 Hasil Tipologi Klassen

PDRB PerKapita(y) / **Laju Pertumbuhan (r)**	**y : 29538,34 yi > y**	**y : 29538,34 yi < y**
ri > r r : 5,42	**(Kuadran I) Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh** Pinrang:5,83/31585,05 Makassar:6,43/73623,54	**(Kuadran II) Daerah Berkembang Cepat** Selayar:5,92/25000,37 Bantaeng : 6,82/27227,81 Jenepono : 5,70/17237,01 Takalar : 5,98/20667,81 Gowa : 6,23/17144,78 Sinjai : 5,89/28639,26 Barru : 5,58/26966,57 Bone : 6,62/26827,17 Soppeng: 6,88/28388,75 Luwu : 5,82/25229,13 TanaToraja:5,92/18246,66 Luwu Utara:6,00/24293,32 TorajaUtara:6,41/20507,44 Palopo : 5,77/28104,46
ri < r r : 5,42	**(Kuadran III) Daerah Maju tetapi Tertekan** Maros : 2,57/37209,39 Pangkep :4,88/48201,42 Wajo : 2,83/31197,39 LuwuTimur:2,13/53310,18 Parepare : 5,20/32048,05	**(Kuadran IV) DaerahRelatif Tertinggal** Bulukumba:4,93/18680,10 Sidrap : 4,99/26602,26 Enrekang :4,88/20982,45

Sumber : Data Diolah, 2022

Dari hasil analisis Tipologi Klassen Pola dan Struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 di perlihatkan dalam Gambar 5.1 Pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah di dapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada kuadran I merupakan kuadran daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki PDRB Per Kapita di atas rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun daerahnya yaitu Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar.
2. Pada kuadran II merupakan kuadran daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini adalah Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara dan kota Palopo, daerah berkembang pesat**.**
3. Pada kuadran III merupakan kuadran daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Adapun daerahnya yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan kepulauan,

Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Parepare. Daerah ini adalah daerah yang maju tertekan.

4. Pada kuadran IV merupakan kuadran daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki PDRB per kapita di bawah rata- rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun daerahnya yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Enrekang. Daerah ini adalah daerah relatif tertinggal.

2. Tingkat Ketimpangan Pembangunan Menurut Indeks Williamson

Selama lima tahun terakhir, ada kecenderungan tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tetapi tingkat peningkatan tidak terlalu besar. Ketimpangan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Analisis Indeks Williamson digunakan untuk mengukur seberapa besar ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks ini memiliki arti jika nilai Indeks Williamson mendekati 0, artinya ketimpangan kecil atau lebih merata dan jika mendekati 1, ketimpangannya besar atau melebar. Selama

tahun 2016 sampai 2020 perhitungan Indeks Williamson memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.3 Tingkat Ketimpangan Pembangunan Menurut Indeks Williamson

Tahun	Indeks Williamson
2016	0,607
2017	0,609
2018	0,621
2019	0,639
2020	0,627
Rata-rata	0,621

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan angka Indeks Williamson, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa ketimpangan yang terjadi antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tahun 2016-2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Indeks Williamson yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 0,639 dan pada tahun 2020 yaitu 0,627 dan Indeks Williamson yang paling terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,607. Diketahui bahwa rata-rata ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawei Selatan selama tahun 2016-2020 sebesar 0,621 dari pengamatan tersebut bisa diketahui bahwa nilai ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahnn 2019 dan penurunan di tahun 2020 hal ini

menujukkan bahwa ketimpangan sedang. Ukuran ketimpangan jika nilai Indeks Williansom mendekati 0 artinya di daerah tersebut ketimpangan kecil atau lebih merata dan apabila nilai Indeks Williamson mendekati 1 maka daerah tersebut terjadi ketimpangan yang sangat besar atau melebar. Jika dilihat dari tabel di atas ketimpangan pembangunan antar di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sedang, kemungkinan hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pembangunan tidak bisa diterima secara merata di setiap wilayah kabupaten.

Tabel 5.4 Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	Indeks Williamson					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Kepulauan Selayar	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,004
Bulukumba	0,070	0,060	0,070	0,080	0,060	0,068
Bantaeng	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,006
Jeneponto	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,088
Takalar	0,050	0,050	0,060	0,050	0,050	0,052
Gowa	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
Sinjai	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Maros	0,080	0,070	0,070	0,070	0,020	0,062
Pangkep	0,130	0,130	0,120	0,120	0,110	0,122
Barru	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Bone	0,020	0,020	0,010	0,010	0,000	0,012
Soppeng	0,010	0,010	0,000	0,000	0,010	0,006
Wajo	0,020	0,020	0,010	0,010	0,010	0,014
Sidrap	0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,008
Pinrang	0,010	0,010	0,020	0,020	0,020	0,016
Enrekang	0,030	0,040	0,040	0,040	0,040	0,038
Luwu	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Tana Toraja	0,060	0,060	0,060	0,060	0,050	0,058
Luwu Utara	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,028
Luwu Timur	0,110	0,100	0,100	0,080	0,090	0,096
Toraja Utara	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,026
Kota Makassar	0,540	0,550	0,560	0,590	0,580	0,564
Kota Parepare	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,004
Kota Palopo	0,010	0,010	0,010	0,020	0,020	0,014

Sumber :Data Diolah, 2022

Hasil Perhitungan Indeks Williamson menunjukkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 yang ditunjukkan oleh nilai indeks Williamson yang lebih besar dari 0, kesenjangan yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Selayar, dan Kota Pare-Pare dengan rata-rata nilai indeks williamson tahun 2016-2020 sebesar 0,004. Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa ketimpangan yang tinggi yaitu terdapat pada Kota Makassar dengan rata-rata 0,546, termasuk dalam kriteria sedang.

.

B. Pembahasan

1. Klasifikasi Analisis Tipologi Klassen Tahun 2016-2020

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan PDRB per kapita yang menjadi

acuan atau PDRB per kapita secara nasional.

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal. Berdasarkan kriteria tersebut daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat kuadran wilayah, diantaranya: Kuadran I. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota. Kuadran II. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota. Kuadran III. Daerah Maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota. Kuadran IV. Daerah relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

Hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar termasuk daerah maju dan tumbuh cepat ini dikarenakan Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar memiliki laju pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan PDRB Per Kapita yang tinggi. Kota Makassar sebagai Ibukota

Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Kota yang menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi besar seperti industri besar, perdagangan besar, pelayanan kesehatan yang memadai, pusat pendidikan, serta terdapatnya pelabuhan menghubungkan Sulawesi Selatan dengan pulau-pulau lainnya, dan merupakan tempat pemberhentian pertama untuk barang-barang yang hendak di distribusikan. Kota Makassar menunjukkan dominasinya terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sumber ekonomi dan fasilitas faktor produksi yang memadai.

Selanjutnya, Kabupaten Pinrang juga merupakan daerah yang masuk kategori maju. Kabupaten Pinrang memiliki sektor potensial dalam pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga sektor yang merupakan penggerak utama kegiatan perekonomian di Kabupaten Pinrang yaitu, Pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hal ini karena Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki area pantai, serta dataran rendah yang didominasi area persawahan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian. Kabupaten Pinrang juga pendapatan daerahnya cukup baik. Kondisi ekonomi cukup stabil, daya beli terjaga, ketersediaan stok pangan melimpah, angkatan kerja tetap tersalurkan dengan baik, walaupun masih terkonsentrasi di sektor andalan yakni agrikultur.

Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat.

Daerah berkembang pesat adalah Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara dan Kota Palopo Termasuk daerah Memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Daerah pada tipologi ini pada dasarnya adalah daerah dengan potensi pengembangan yang sangat besar namun belum dimanfaatkan sepenuhnya secara optimal.

Kabupaten Selayar memiliki keunggulun kompetitif dan nilai kontribusi yang besar dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini yaitu sektor pertanian pada komoditas tanaman pangan, komoditas yang paling unggul untuk dijadikan basis sektor tanaman pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar

adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Selain itu Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penghasil kopra terbesar di Sulawesi Selatan. Seiring dengan anjoknya harga kopra nasional berdampak pada petani kelapa/kopra pada semua wilayah yang ada di Indonesia, dampaknya juga berimbas ke petani kopra di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga pendapatan daerah mengalami kendala yang bisa mengakibatkan menurunnya PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sektor pertanian adalah sektor yang sangat di andalkan Kabupaten Bantaeng karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kol, wortel, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Selain itu Kabupaten Bantaeng memiliki perkembangan pesat pada pertanian rumput lumput laut.

. Selanjutnya, Kabupaten Jeneponto mengalami perkembangan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor, konstruksi. Selanjutnya, Kabupaten Takalar memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, diantaranya yaitu tambak seluas 500 hektar dengan sekali panen bisa menghasilkan 40 sampai 50 ton udang, rumput laut yang menjadi potensi di Kabupaten Takalar karena mempunyai lawi-lawi yang jauh lebih baik dari

daerah lain, serta memiliki objek wisata yang banyak diminati bagi parawisatawan lokal diantaranya Pantai Topojawa, dan Galesong

Kemudian, Kabupaten Gowa mengalami perubahan siginifikan. Mulai dari sektor pertumbuhan pembangunan fisik dan non fisik. Yang paling mengalami perkembangan yaitu pada usaha tanaman hias anggrek, kemudia Peningkatan pertanian. Hal ini menyebabkan Kabupaten Gowa berkembang pesat. Selanjunya, Kabupaten Sinjai mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan pembangunan infrastruktur berdampak terhadap sektor perekonomian. Hasil produksi pertanian mudah dijual dan tidak terlantar karena jalan sudah mulus. Destinasi wisata mudah dijangkau dengan terbukanya akses jalan.

Kabupaten Barru wilayahnya yang subur, memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah adalah sektor industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata ditambah pembangunan infrastruktur menjadikan Kabupaten Barru berkembang pesat. Selanjutnya, perkembangan Kabupaten Bone diakibatkan oleh sektor tanaman pangan padi, jagung dan kedelai. Produksi padi merupakan paling tertinggi diantara semua kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan. Kabupaten Soppeng, potensi sektor pemberasaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daerah pemekaran Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara menjadi daerah yang berkembang dengan cepat karena memiliki komoditi unggulan di sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Kabupaten Tana Toraja merupakan ikon budaya dan pariwisita yang menjadi potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi, Kabupaten Toraja Utara mengalami perkembangan pada pertanian, perkebunan. Kota Palopo memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian, perikanan serta pengembangan infrastruktur.

Pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena di masa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Daerah yang maju tapi tertekan adalah Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Pare-Pare merupakan kuadran daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi

Selatan dan memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Maros daerah yang maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama. sektor transportasi udara yang menjadi penyumbang terbesar di Kabupaten Maros mengalami penurunan hal ini disebabkan karena faktor alam, dan turunnya jumlah penumpang. Kabupaten Pangkep juga merupakan daerah yang maju tetapi dalam pemanfaatan potensi pertambangannya belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya investor untuk mengelola sektor galian di Kabupaten Pangkep.

Selanjutnya, Kabupaten Wajo yang merupakan daerah berpendapatan tinggi namun pertumbuhan ekonominya rendah memiliki sektor pertanian dan pengadaan listrik dan gas yang menjadi unggulan. Pada Kabupaten Luwu Timur yang menjadi sektor utamanya yaitu produksi pertambangan, perkebunan, dan tanaman pangan tetapi dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan.

Kota Parepare yang berada di dekat laut walaupun padat akan kegiatan ekonomi, dalam hal jasa, perdagangan, terdapat pelabuhan yang letaknya strategis, serta kurangnya pemanfaatan potensi wisata daerah. Berdasarkan rata-rata akibat dominasi pertumbuhan ekonomi yang rendah dibanding tahun-tahun

seblemunya menjadikannya daerah maju tapi tertekan. Daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang relatif tertinggal. Keempat Kabupaten/kota ini lebih rendah laju pertumbuhan ekonomi dan laju pendapatannya jika di bandingkan dengan Provinsi. Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian secara signifikan. Terjadinya perlambatan pertumbuhan khusunya di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Selanjutnya, Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami penurunan pertumbuhan pada sektor pertanian, yang merupakan sektor dominan Pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan hingga minus Kemudian, Kabupaten Enrekang walaupun wilayah didominasi oleh pegunungan hasil pertanian tanaman pangan/holtikutura, dan perkebunan tidak terlalu menghasilkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan

ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.

Dengan demikin dalam penelitian terbukti, bahwa terdapat perbedaan klasifikasi antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Laju Pertumbuhan dan PDRB per kapita menurut Tipologi Klassen. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh 4 kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 21,7%.

Salah satu tujuan utama suatu wilayah adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Cara yang dilakukan dalam meningkatkan kemakmuran masyrakatnya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi dalam ruang lingkup wilayah, dapat menggunakan PDRB. Peningkatan nilai tambah dari

suatu bahan baku menjadi sebuah produk, menunjukkan adanya perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan nilai tambah dari berbagai macam sektor tersebut dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto.

Daerah tertinggal dapat memprioritaskan pembangunan dengan kebijakan ekonomi dan merumuskan program yang mengutamakan mempertahankan pertumbuhan, pengembangan dan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah. Selain itu kebijakan dan program pembangunan ekonomi pada daerah tertinggal juga mempertimbangkan transformasi struktural ekonomi yang terjadi serta mengarahkan perhatian pada sektor-sektor potensial yang berkontribusi dominan terhadap pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat dasar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat menjadi salah satu cara menggerakan roda ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan penguatan infrastruktur wilayah menjadi fokus utama pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. dalam jangka pendek, proyek infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja dan menarik investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun

penanaman modal asing. Dalam jangka menengah panjang, infrastruktur mampu meningkatkan perekonomian daerah, sehingga pembangunan proyek infrastruktur perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini khususnya mengingat posisi Sulawesi Selatan terletak sebagai hub ke Indonesia bagian timur sehingga potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

Infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan harus lebih diutamakan dan ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena ini merupakan faktor yang sangat menunjang agar sumber daya manusia terus berkembang dan mampu mengelolah sumber daya alam dengan baik agar memiliki nilai tambah yang tinggi demi kemajuan daerah itu sendiri.

2. Tingkat Ketimpangan Analisis Indeks Williamson Tahun 2016-2020.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pebangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

antar wilayah.

Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah.

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis beberapa besarnya kesenjangan antar wilayah adalah dengan melalui perhitungan Indeks Williamson. Formula Indeks Williamson menggunakan PDRB Perkapita dan jumlah penduduk, dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau ($0<W<1$). Dengan indikator bahwa apabila semakin kecil nilai Indeks Williamson maka menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah begitu pula sebaliknya semakin besar angka Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat banyak orang

miskin. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa suatu daerah mengalami kesenjangan yang tinggi jika ada sekelompok orang kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Pendapat masyarakat tersebut lebih cenderung mengarah ke distribusi pendapatan yang melihat kesenjangan antar kelompok masyarakat, sedangkan untuk kesenjangan pembangunan antar daerah lebih melihat ke perbedaan antar daerah. Dalam penelitian ini akan dihitung indeks williamson untuk mengetahui kesenjangan pembangunan dengan menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 Kabupaten/Kota yang sangat beragam dari sisi geografis, sosial, dan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson.

Rumus Williamson mengaitkan beberapa variabel, yakni jumlah penduduk yang akan menentukan seberapa besar kesenjangan dari daerah, tingkat PDRB Per Kapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 angka Indeks Williamson adalah 0,607 kemudian mengalami penaikan tahun 2017 sebesar 0,609 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,621 dan peningkatan paling tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,639 dan mengalami penurunan 2020 sebesar 0,627. Hasil rata-rata 2016-2020 ketimpangan pada Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 0,621 hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan sedang.

Ketimpangan paling tinggi pada tahun 2019 hal ini disebabkan jumlah penduduk yang tinggi dan tingginya tingkat PDRB Per Kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak meningkatnya angka penduduk usia kerja dan hal ini memperbesar jumlah angkatan kerja. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan jumlah angkatan kerja meningkat sehingga menyebabkan pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan, apabila tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan yang masih bergantung pada pekerjaan informal yang tidak menuntut latar belakang pendidikan sebagai prasyarat.

Kesenjangan yang paling tinggi terdapat pada Kota

Makassar dengan rata-rata nilai Indeks Williamson tahun 2016-2020 sebesar 0,546. Ketimpangan ini terjadi karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor basis di daerah tertentu, sehingga yang menikmati hasilnya hanya sebagian, serta adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki antar Kabupaten/kota sehingga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur antar daerah. Infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan harus lebih di utamakan dan ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena ini merupakan faktor yang sangat menunjang agar sumber daya manusia terus berkembang dan mampu mengelolah sumber daya alam dengan baik agar memiliki nilai tambah yang tinggit demi kemajuan daerah itu sendiri. Pembangunan infrastruktur ini harus merata di setiap daerah di Provinsi Sulawesi Selatan agar ketimpangan antar daerah berkurang atau tidak ada lagi.

Secara umum kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan cenderung menurun seiring dengan jumlah penduduk miskin yang meningkat. Berdasarkan lokasinya, persentase penduduk miskin di perdesaan masih lebih besar dibandingkan persentase penduduk miskin di perkotaan. Hal ini dapat dipahami seiring jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan jauh lebih banyak dan minimnya informasi yang diperoleh serta relatif tidak memiliki banyak pilihan lapangan pekerjaan. Selain itu, kenaikan kemiskinan

disebabkan juga oleh kenaikan harga komoditi. Komoditi makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras, sehingga penduduk miskin, khususnya mereka berada di sekitar garis kemiskinan, tidak mampu mengimbangi kenaikan tersebut.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah pedesaan atau dengan kata lain daerah perkotaan menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam yang umumnya ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Adanya ketimpangan pembangunan dan kurangnya lapangan pekerjaan di desa akan mendorong migrasi masyarakat desa ke kota. Diperlukan perencanaan pembangunan desa yang berkesinambungan untuk mengurangi gap antara desa dan kota tersebut. Tingkat kesenjangan pendapatan yang tercermin dari gini rasio

Kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena jika tingkat kemiskinan suatu daerah cukup tinggi, maka daya beli masyarakat akan kurang. Akibatnya perusahaan atau produsen tidak dapat menjual banyak barang dan jasa dalam negeri. Maka dari itu produsen di suatu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi akan memproduksi sedikit barang sehingga mereka tidak mengalami kerugian. Dengan begitu, jumlah produksi barang tidak akan mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan.

Semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara atau wilayah, semakin rendah pula tingkat pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah tersebut. Sebaliknya, jika suatu negara atau wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah tersebut semakin bagus. Ketimpangan ini terjadi karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor basis di daerah tertentu, serta adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki antar kabupaten/kota sehingga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur antar daerah.

Sehingga, penciptaan dan Penambahan lapangan kerja dapat meningkatnya taraf hidup masyarakat. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran

akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi di segala sektor baik berupa pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, sektor industri. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan. Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Baiq hipztiwaty, Putu Karismawan, Baiq Ismiwaty (2019) yang meneliti tentang disparitas pendapatan antar daerah dengan analisis Indeks Wiliamson Adanya hubungan negatif antara nilai disparitas pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat, memberi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakatdi Nusa Tenggara Barat ditentukan oleh menurunnya disparitas pendapatan. Semakin melebarnya ketimpangan antar Kabupaten/Kota akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan sosial. Menurunnya angka disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota akan berdampak pada terciptanya pemerataan pembangunan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

Riris Lestari Nababan, Banatul Hayati (2019) yang meneliti tentang disparitas Pendapatan di Pulau Jawa hanya memberikan berapa besar tingkat ketimpangan. Pada penelitan Nursa Fitri, Junaiddin Zakaria, Hasbi (2021) dengan penelitian Disparitas Pendapatan antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2019 Provinsi Sulawesi Selatan ketimpangan pendapatan antar daerah pada yang semakin melebar akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya hubungan negatif antara nilai disparitas pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia. memberi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan oleh menurunnya disparitas pendapatan.

Namun perbedaannnya, terletak pada objek penelitian, tahun penelitian serta pada penelitian sebelumnya tidak menjelaskan daerah/kota manakah yang mengalami ketimpangan hanya menyajikan tingkat ketimpangan pertahunnya. Sedangkan persamaannya sama-sama mengidentifikasi perekonomian regional.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut alat analis Tipologi Klassen Klasifikasi yang termasuk ke dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar, daerah maju tapi tertekan adalah Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Parepare, daerah berkembang pesat adalah Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Toraja Utara dan Kota Palopo. Kemudian daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Enrekang
2. Tingkat Ketimpangan Indeks Williamson pada periode pengamatan tahun 2016-2020, Tingkat Ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berada di tingkat sedang. Rata-rata angka Indeks Williamson di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,621. Sedangkan

Kabupaten/Kota yang mengalami disparitas yaitu Kota Makassar kriteria sedang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan ekonomi di prioritaskan kepada daerah yang relatif tertinggal untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Diharapkan kiranya konsentrasi ekonomi lebih merata di setiap Kabupaten/kota di agar ketimpangan di daerah menurun dan menciptakan laju pertumbuhan ekonomi dan maju merata.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mampu merumuskan kebijakan dan mengarahkan pengembangan pembangunan infrastruktur yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota yang selama ini tingkat pembangunanya masih tertinggal.di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad,Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2021. Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2020. Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2021. Seri 2010 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan menurut Lapangan Usaha 2016-2020. BPS Sulawesi Selatan.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)". http://www.bps.go.id. Diakses pada 10 November 2021.

Boediono. 2013. *Makro Ekonomi*. BPFE UGM. Yogyakarta.

Fitri, Nursa. Dkk. 2021. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia. Volume 8,* Nomor 1 , Tahun 2021, Halaman 1-35. Diakses pada 09 November 2021

Hipziwaty Baiq , Karismawan Putu, Ismiwaty Baiq. 2019. "Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kesejahteraan Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Ganec Swara* 13 (1): 59. https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.63.

Khuluk, Dwi Reza Khusnul, dkk. 2021. "Analisis Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Daerah Penyangga Surabaya".*Jurnal Ekonomi Pembangunan,* Vol 7, No.1. 9-24.

M, Hasan dan, and M Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat : Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Edisi Kedua. Makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu.

Muhammad, Firdaus. 2013. "Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Di Indonesia: Fakta Dan Strategi Inisiatif" http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73654, di akses pada 01 Januari 2022.

Muhtarom, Abid. 2017. “Disparitas Pendapatan Regional Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Akuntansi* 2 (2): 23. https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i2.98.

Azizah, Muharomatul. 2016. Ketimpangan Ekonomi. https://azizah7blog.wordpress.com/2016/04/21/ketimpangan-ekonomi/. Diakses pada tanggal 7 Februaru 2022.

Nababan dkk. 2019. "Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016". *Diponegoro Journal Of Economic Development* Volume 5, Tahun 2019, Hal 1-15. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.

Sarnowo, Henry. 2010. "Klasifikasi Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Pendekatan Tipologi Klassen". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.1. No. 2, 169-178. Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta.

Shaid, Nur Jamal. 2022. “Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian, Ciri Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.” Kompas.Com. 2022. https://money.kompas.com/read/2022/01/08/080854626/pertumbuhan-ekonomi-pengertian-ciri-dan-faktor-yang-mempengaruhinya.

Simorangkir, Paolo Valentiono. 2021. Manfaat Perbandingan Ekonomi antar Wilayah di Indonesia. https://kumparan.com/120-paolo-valentino-simorangkir/manfaat-perbandingan-ekonomi-antar-wilayah-di-indonesia-1wQUi6kX33O/2. Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Subana M., Sudarajat, 2011. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung :Pustaka Setia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Afabeta.

Sukirno, S. 2015. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta.

Syafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.* Jakarta : Rajawali Press.

Todaro, dan Smith . 2011. *Pembangunan Ekonomi* .Edisi Keseblas jilid 2. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.